

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BENDA SEWA  
SEBAGAI WAKAF  
(Studi Terhadap Pasal 16 Ayat 3 Huruf (F) Undang-Undang No 41 Tahun  
2004 Tentang Wakaf)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.

**Oleh**

**SIFA FAUZIAH  
NPM : 1421030139**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BENDA SEWA  
SEBAGAI WAKAF  
(Studi Terhadap Pasal 16 Ayat 3 Huruf (F) Undang-Undang No 41 Tahun  
2004 Tentang Wakaf)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.



**Oleh**

**SIFA FAUZIAH  
NPM : 1421030139**

**Program Studi : Mu'amalah**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M**

## ABSTRAK

Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam mengajarkan kita memperoleh harta dan Islam pula mengajarkan kita cara mendistribusikan harta salah satunya yakni dengan berwakaf. Wakaf merupakan ibadah yang berbentuk sosial. Pada zaman Rasulullah SAW benda yang bisa di wakafkan hanya benda tidak bergerak yaitu tanah. Namun di era moderen ini dengan di aturnya UU No 41 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat 3 huruf (f) diatur bahwasannya harta benda bergerak dapat di wakafkan salah satunya yaitu harta benda hak sewa, sedangkan dijelaskan dalam Islam bahwasannya wakaf itu harus merupakan harta benda milik pribadi (milik sempurna).

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis UU No 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 3 huruf (f) terhadap harta benda sewa sebagai wakaf dalam pandangan hukum Islam. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban tentang harta benda wakaf berupa hak sewa dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan guna mencari berbagai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, dan berbagai dokumen, seperti dengan mengumpulkan dan membaca referensi melalui internet dan data yang dapat mendukung penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah diskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan khazamah fiqh para ulama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mewakafkan harta hak sewa (hak pakai dalam obyek) sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf diperbolehkan dikarenakan sesuai kaidah ushul fiqh dimana tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat perubahan hukum sesuai dengan perubahan masa, maka dengan berkembangnya zaman berkembang pula hukum wakaf, banyak dilahirkan dari hasil ijtihad dan istihsan. Jadi wakaf selalu ada perkembangan sesuai dengan waktu dan tempat. Dan Madzhab Syafi'iyah membolehkan harta benda sewa sebagai wakaf karena mereka beranggapan bahwasanya keabadian wakaf tidak disyariatkan. Selain itu juga, tidak ada ketentuan bahwa harta hak sewa tidak boleh ditransaksikan lagi, untuk disewakan kembali pun diperbolehkan apalagi untuk tujuan ibadah (wakaf).





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.


Nama : Sifa Fauziah  
NPM : 1421030139  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat 3 Huruf (f) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**H. Rohmat, S. Ag., M.H.I**  
**NIP.196711201997031001**

  
**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**  
**NIP.1973042000032002**

**Ketua Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung**

  
**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**  
**NIP.197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**


*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BENDA SEWA SEBAGAI WAKAF (STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT 3 HURUF (F) UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)”**, disusun oleh **Sifa Fauziah, NPM: 1421030139, Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Selasa, 08 Mei 2018**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

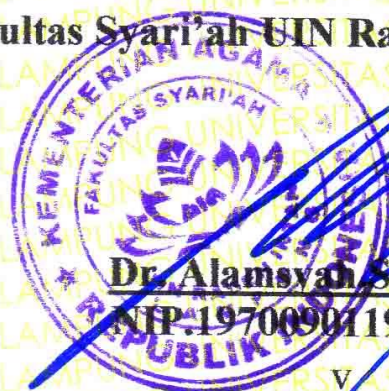
**Ketua** : Relit Nur Edi, S.Ag.,M. Kom.I. 

**Sekretaris** : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 

**Penguji I** : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. 

**Penguji II** : H. Rohmat, S. Ag. M.H.I 

**Dekan  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Alamsyah S.Ag.,M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

عَلَيْمٌ بِهِ ۚ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٌ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَأْلُوا لَن

(آل عمران : ٩٦) ﴿٩٦﴾

Artinya : “Kamu sekali- sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS : Al-Imran : 92)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI Al- Hikmah *Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, h. 62.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Sifa Fauziah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Maret 1997, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri pasangan Bapak Acep Syarifudin dan Ibu Masamah. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu kakak laki-laki bernama Muhammad Farid Wajedi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Riyana Al-Amin Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002.
2. SD Negeri 2 Kampung Sawah Lama Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008.
3. SMP Raudhathul Qur'an Kota Metro pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
4. Kemudian melanjutkan di MAN 2 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.
5. Tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah pada Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) melalui jalur seleksi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat 3 Huruf (F) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. H. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;



4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
5. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Mu'amalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung;
10. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudmu;
11. Kakakku tercinta Muhammad Farid Wajeddi, semoga Allah menanamkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita;
12. Sahabat-sahabatku, Ria Anisya Fitri, Tri Setia, Windiyan Ngesti, Saidah, Narulita Sari, Lina Oktasari yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya;
13. Motivator terbaik Khairul Ramadhan;
14. Teman-teman Muamalah C angkatan 2014, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini;

15. Kelurga Tim Ruwed Witri Wulandari, Dede Indriyani, Wuri Indayai yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk lebih baik lagi.
16. Sahabat seperjuangan masa SD hingga sekarang, Aan Andriyani, Ifha Ardiyanti, Novia Oviyanti yang telah memberikan semangat dan dukungannya dari jauh;
17. Teman-teman KKN Kelompok 174 Tahun 2017 Kecamatan Gayam, Kabupaten Lampung Selatan;
18. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 08 Mei 2018

Penulis

Sifa Fauziah

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	<b>i</b>
.....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
 <b>BAB II      WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Wakaf .....	13
B. Dasar Hukum Wakaf .....	18
C. Sejarah Wakaf .....	23
D. Syarat Ketentuan Wakaf .....	27
E. Macam-Macam Wakaf .....	37
F. Pendapat Madzhab tentang Harta Benda Sewa sebagai Wakaf .....	39
 <b>BAB III      UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HARTA BENDA SEWA SEBAGAI WAKAF</b>	
A. Konsep Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	41
B. Harta Benda Sewa sebagai Wakaf .....	54
 <b>BAB IV      ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BENDA SEWA SEBAGAI WAKAF DALAM PASAL 16 AYAT 3 HURUF (F) DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>62</b>
 <b>BAB V      PENUTUP</b>	



A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu di uraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat 3 Huruf (F)UU No 41 Tahun 2004 Tentang Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.”<sup>2</sup>
2. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “barang yang menjadi kekayaan milik seseorang.”<sup>3</sup>
3. Sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “pemakaian sesuatu dengan membayar uang.”<sup>4</sup>
4. Wakaf adalah “menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk kepentingan umum.”<sup>5</sup>
5. Harta Benda Hak Sewa yang dimaksud dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu hak pakai dan hak pakai hasil atas benda

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 58.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h., 485.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h., 1296.

<sup>5</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 236

bergerak.<sup>6</sup>Namun yang dimaksud dalam skripsi ini ialah hak pakai yang diwakafkan bukan hak pakai hasil atas benda bergerak.

Berdasarkan uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah menganalisis UU No. 41 tahun 2004 tentang hak sewa benda sebagai harta wakaf apakah diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak.

#### B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya :

##### 1. Secara Objektif

Islam merupakan agama yang sempurna dengan berbagai ajarannya. Wakaf merupakan salah satu bentuk kesempurnaan dalam ajarannya.

Dijelaskan bahwa sawakaf itu harus merupakan harta benda milik pribadi (milik sempurna). Namun dengan seiring berkembangnya zaman, berkembang pula aturan di dalam masyarakat seperti dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (3) huruf (f), dimana didalamnya disebutkan wakaf yang berupa harta benda bergerak itu harta benda yang dikonsumsi, salah satunya adalah hak sewa. Sebagaimana hak dari barang tersebut, dan jelas bukan harta milik pribadi.

##### 2. Secara Subjektif

Pembahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, serta tersedianya data yang cukup.

---

<sup>6</sup>[m.hukumonline.com/klinik/detail/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah).



### C. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tindakan perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniah. Diantara praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW adalah praktik yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.<sup>7</sup> Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan adalah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 4.

delapan ratus dirham sebagaimana disebutkan dalam buku “Sirah Nabawiyah”. Dengan demikian Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.<sup>8</sup> Menurut pendapat sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khathab yaitu dengan menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola) dan menyedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu.<sup>9</sup>

Pada dasarnya al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup melalui wakaf.<sup>10</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92 menyatakan sebagai berikut:

﴿عَلَيْكُمْ بِهِ ۚ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٌ مِّن تُفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرْتَنَالُونَ﴾

آل عمران: ٩٦

Artinya : “ *Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*”<sup>11</sup>

Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk kategori sedekah *jariyyah* yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa

---

<sup>8</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifah, 2007), h.6.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.5.

<sup>10</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-2, 1997),h. 103

<sup>11</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, h. 62.

dipetik.<sup>12</sup> Pewakafan atau wakaf dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan. Wakaf sebagai salah satu bentuk dari ibadah telah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Terbentuk dari tatanan kehidupan masyarakat dimuka bumi. Seperti menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Keberadaan wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan Islam, dan sudah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam. Di Indonesia misalnya, dengan mayoritas penduduknya masyarakat baik di bidang sosial, pendidikan maupun di bidang ekonomi. Hampir setiap ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, di bangun di atas tanah wakaf.

Setelah Islam datang perwakafan di Indonesia lebih menunjukkan eksistensinya. Praktek perwakafan ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber pada nilai-nilai Islam, bahkan dengan diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat merupakan suatu hal yang wajar oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>13</sup> Tetapi bentuk perwakafan di praktekkan di Indonesia hanya dalam bentuk tanah, tidak dalam bentuk lain (benda bergerak) dan masih terfokus pada pembangunan fisik tempat ibadah, padahal wakaf itu sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan cara pemberdayaan dan pengelolaan secara produktif.

---

<sup>12</sup>Helmi Karim, Op.Cit., 104.

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.72.



Sebenarnya telah ada peraturan tentang wakaf di Indonesia, seperti halnya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, PP No. 28 Tahun 1977 dan Inpers dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun peraturan-peraturan tentang wakaf yang ada dirasakan kurang memadai dan minimnya kesadaran para pelaku yang terkait dengan wakaf untuk mendaftarkan wakafnya kepada pejabat yang berwenang.<sup>14</sup>

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.<sup>15</sup> Dengan melihat kondisi di lapangan tentang perwakafan, bagaimana wakaf kurang memperhatikan administrasi (mendaftarkan tanah wakaf), dan juga kurang adanya pengelolaan secara produktif hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah tidak ada pengetahuan yang cukup, pengalaman teknis yang tidak sesuai, kerusakan administrasi, tidak adanya dorongan dalam personal pengurus, serta lemahnya sumber daya manusia yang tersedia, disamping minimnya subsidi dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan, maka pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan diundangkannya UU RI No. 41 Tahun 2004, diharapkan berbagai persoalan perwakafan dapat diatasi. Perluasan sumber wakaf

---

<sup>14</sup>Ibid,h.2.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2007)

<sup>16</sup>Mundzir Qahaf, *Op.Cit.*, h. 296.

dimana harta benda bergerak baik berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan-peraturan perundang-undangan, diperbolehkan untuk diwakafkan.<sup>17</sup> Disamping itu juga, diharapkan agar harta benda wakaf difungsikan dan dimanfaatkan lebih profesional.

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang ada selama ini. UU RI No. 41 Tahun 2004 ini terdapat hal baru. Beberapa hal baru di antaranya adalah mengenai masalah nazir (orang yang memegang amanat untuk memelihara harta wakaf), harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) baik harta wakaf bergerak maupun tidak bergerak, peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), dan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta adanya penambahan dalam definisi wakaf dan unsur atau rukun wakaf.

Dalam fiqih klasik wakaf itu harus merupakan harta benda milik pribadi (milik sempurna). Tetapi dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (3) huruf (f), dimana didalamnya disebutkan wakaf yang berupa harta benda bergerak itu benda yang tidak habis dikonsumsi, salah satunya adalah hak sewa. Sebagaimana diketahui hak sewa ialah penyewa hanya dapat menikmati, bukan memiliki hak dan barang tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm 155.

<sup>18</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Ke- 10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 41.

Perkembangan harta wakaf sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) huruf (f), membuat penyusun tertarik untuk melakukan hal tersebut, dalam kajian skripsi. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang wakaf. Agar pembahasan dalam skripsi ini komprehensif, maka penyusun memfokuskan kajian yang membahas UU RI No. 41 Tahun 2004 dengan judul :  
**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 16 AYAT 3 HURUF (F)UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG HARTA BENDA SEWA SEBAGAI WAKAF”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap harta benda berupa hak sewa dalam Pasal 16 ayat 3 huruf (f) Undang- Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf ?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana harta benda wakaf berupa hak sewa dalam Pasal 16 Ayat 3 huruf (f) dalam pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambahkan khasanah keilmuan tentang wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan wakaf khususnya dalam hal harta benda wakaf berupa hak sewa.



- b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan tentang perwakafan.
- c. Diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan dimanfaatkan untuk memahami konsep kepemilikan harta wakaf.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan proposal ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.<sup>19</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi,

---

<sup>19</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusan Penelitian dan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 10.

gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>20</sup>

Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, serta membandingkannya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi:

---

<sup>20</sup>Kacian, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta :Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 68.

a. Bahan Hukum Primer (pokok).

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber padabuku tentang hak sewa sebagai wakaf, UU 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain, dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun skunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.

## 5. Pengolahan Data

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu tehnik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus atau upaya penghususan suatu hasil penelitian atau data yang umum sifatnya.

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004, hlm. 131.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Wakaf

Wakaf yang aslinya ditulis *waqf* telah dipakai sebagai salah satu peristilahan perundang-undangan di Indonesia, yang asliya berasal dari bahasa Arab. Kata *al-waqf* sama artinya dengan *al-habs 'an al-tasharruf* atau penahanan dari memakainya, yakni seseorang menahan harta yang dimilikinya dan tidak memakai serta tidak memindah milikkannya.<sup>23</sup> Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti “menahan harta, tidak dipakai oleh pemiliknya, tidak pula diizinkan untuk di pindahmilikkan.”<sup>24</sup>

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mushah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>25</sup> Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadist Nabi SAW berbunyi :<sup>26</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ  
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رواه مسلم).

---

<sup>23</sup> Ahmad Warsono Munawir, *kamus al-munawir*, Surabaya, Pustaka progresif, 1997, h. 1576

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-2, 1997),h. 101.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 51.

<sup>26</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223

Artinya : Berasal dari Abu Hurarah, seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan : (1) pahala amalan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya selama ia hidup, (2) pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkannya selama hayatnya, dan (3) doa anak (amal) saleh yakni anak yang membalas guna orang tuanya dan mendoakan ayah-ibunya kendatipun orang tuanya telah tiada. (HR Muslim) Para ahli sependapat bahawa yang di maksud dengan (pahala) *shadaqah jariyah* dalam hadist itu adalah (pahala) wakaf yang diberikannya di kala seseorang masih hidup.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang ditimbulkan. yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ahli fiqh sebagai berikut :

1. Muhammad al- Syarbini al- Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah :

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *Tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya”<sup>28</sup>

2. Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok

---

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Unervisitas Indonesia, 2006), h. 80.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-9, 2014), h. 239.

barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah”. Dalam terminologi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.<sup>29</sup>

3. Imam Taqiyah al-Din Abi Bakr bin Muhammad al- Husaeni berkata wakaf ialah:

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya),dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.”<sup>30</sup>

4. Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikah “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”<sup>31</sup>
5. Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf adalah menjadikan harta wakif berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) untuk orang-orang

---

<sup>29</sup>Baslul Hazmi, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia* , dalam *Jurnal Hukum* Vol XVI, No 1, Juni 2016 : 178.

<sup>30</sup>*Ibid.*, 240.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2007), h. 2.

yang berhak dengan sighat tertentu dalam jangka waktu sesuai dengan kehendak wakaf.<sup>32</sup>

6. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakid dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tidakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

7. Madzhab Lain

Madzhab lain sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alah* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alah* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang untuk diberikan kepada orang lain ataupun lembaga yang objeknya dapat dimanfaatkan oleh individu ataupun orang banyak sesuai ajaran Islam.

Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf mewujudkan potensi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*



dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>34</sup>

## B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang ada pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf antara lain sebagai berikut:

### 1. Al- Qur'an

#### a. Al-Qur'an surah al-Baqarah : 261

فِي سَنَابِلَ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ  
عَلِيمٍ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعُفُوا اللَّهَ حَبَّةٌ مِثْلَ سِنَابَةٍ كُلِّ (البقرة: ٢٦١)

Artinya : “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia khendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>35</sup>

Berkaitan dengan ayat diatas, dalam memahami maksud dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan

<sup>34</sup> M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, cetakan pertama, Yrama Widya, Bandung, 2014, h. 60.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, h. 44.

pendidikan, beasiswa dan kesehatan bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas, tampak bahwa infak dan wakaf itu sangat luas. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Apabila demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Al-Sa'adi mengatakan bahwa ini adalah motivasi besar dari Allah bagi hamba-Nya untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah.<sup>37</sup>

**b. Al-Qur'an surah al- Hajj : 77**

الْخَيْرَ وَافْعَلُوا رَبِّكُمْ وَعَبُدُوا وَسَجِدُوا أَرْكَعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ (الحج: ٧٧)

Artinya : “ *Hai orang- orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan* ”<sup>38</sup>

Untuk mendapatkan kemenangan (*al-falah*), Allah memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah mengkhususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf*, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm.56.

<sup>37</sup> Al- 'Allamah al-Syeikh Abi Abdillah Abdurahma bin Nasir abdillah bin Nasir al-Sa'adi, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Dar Ilhya al-Turats al- 'Arabi, Beirut-Libanon. Cet. I 1420 H/1999 M, hlm. 123.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h, 341.

memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (*waya 'muruhum bifi'ili al-khayr 'umuman*). Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan *al-khayr* itu dalah umum, maka dalam tafsir lain disebutkan maksudnya adalah seperti silaturahmi dan akhlak yang mulia (*ka-shilah al-rahmi wa makarim al-akhlak*). Atau seperti diktakan A. Yusuf Ali bahwa *waf'alu al-khayr* bermakna '*ad do good*'.<sup>39</sup>

Memperhatikan penafsiran diatas yang menyebutkan bahwa *al-khayr* itu adalah perbuatan baik secara umum, antara lain adalah berwakaf. Dalam berwakaf ini hendaknya dilakukan dengan profesional, sehigga pengelolaanya dan peruntukannya dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan;
- 3) Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu;
- 4) Peningkatan ekonomi umat;
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum.<sup>40</sup>

**c. Al-Qur'an surah Ali Imran : 92**

مُرِبِهِ ٱللَّهُ فَإِنْ شِئَ مِنْ تَنْفِقُواْ وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُواْ حَتَّىٰ ٱلْبَرَّتَ ٱلْأَوَ ٱلنَّ

عَلِي (آل عمران : ٩٢)

---

<sup>39</sup>Suhrawadi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 17.

<sup>40</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, h. 25.

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui” (QS: Ali Imran : 92).<sup>41</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surah al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak keseriusan yang berwakaf (*waqif*) seperti mewakafkan tanah milik di perkotaan yang harganya terus meroket (bertambah mahal), tetapi karena ingin mencapai ridha Allah, seorang tidak merasa rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian, sang *waqif* ada kepedulian sosial.<sup>42</sup>

## 2. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا  
بَخِيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصِيبُ

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI Al- Hikmah *Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, h. 62.

<sup>42</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Op.cit*, h. 15.



أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِْبْ مَا لَاقَطْتُ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ  
 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَاءُ لَمْ يَأْخُذْ وَلَا  
 يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ لِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ  
 غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه المسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar bin al-Khattab mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rasulullah SAW meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar berkata: "Wahai Rasulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini? "beliau bersabda: "jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya" Ibnu Umar berkata: "maka Umar pun mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Ibnu Umar berkata lagi: "lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya boleh memakannya (menggunakannya) dengan cara yang baik atau memberi makan teman tanpa maksud memperkaya diri."<sup>43</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنٌ  
 أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ  
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw.  
 Bersabda: apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga  
 (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau  
 anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya" (HR. Muslim).<sup>44</sup>

### C. Sejarah Wakaf

<sup>43</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T, Th), h. 16631.

<sup>44</sup> Ibid., h. 1223,

## 1. Masa Rasulullah

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّهٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ  
أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ وَقَالَ الْأَنْصَارُ  
صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : *“Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam ? orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”.* (Asy-Syaukani : 129)<sup>45</sup>

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin al-Khattab. Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.4

bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “bairahah”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. Lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang di peruntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar al- Anshar*” kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.<sup>46</sup>

## 2. Masa Dinasti- Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswinya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

betapa bermanfaatnya lembaga wakaf, maka timbulah keinginan untuk mengaturperwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individual atau keluarga.<sup>47</sup>

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al- Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawa Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.<sup>48</sup>

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al- Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2007), h. 6.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>49</sup> *Ibid.*,



Dan pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf pun sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan untuk merawat masjid.<sup>50</sup>

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat ini.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari negara Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum bangsa Indonesia sendiri. Disamping

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 8-9.

itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>51</sup>

#### D. Syarat Ketentuan Wakaf

##### 1. Rukun Wakaf

Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi,<sup>52</sup> diantaranya yaitu:

- a. *Al-Waqif*, yaitu orang yang berwakaf.
  - 1) Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam.
  - 2) Kehendak Sendiri; tidak sah karena dipaksa.<sup>53</sup>
- b. *Al-Mauquf*, yaitu benda yang diwakafkan.
  - 1) Kekal zatnya. Berarti bila manfaatnya di ambil, zat barang itu tidak rusak.
  - 2) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya'* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا  
بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي  
أُصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي  
بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَاؤُهُ  
لَا يُبَاغُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>52</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999, h. 32.

<sup>53</sup> Suliman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung, 2007, h. 341.

اللّٰهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ لِيُهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه المسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar bin al-Khattab mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rasulullah SAW meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar berkata: „Wahai Rasulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini? "beliau bersabda: "jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya" Ibnu Umar berkata: "maka Umar pun mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Ibnu Umar berkata lagi: "lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya boleh memakannya (menggunakannya) dengan cara yang baik atau memberi makan teman tanpa maksud memperkaya diri."<sup>54</sup>

Seratus saham kepunyaan Umar yang disebutkan dalam hadis dia atas adalah *musya'*. Oleh karena itu, hadis menjadi dalil sahnya wakaf *musya'*.<sup>55</sup>

Contohnya A mewakafkan sebagian dari *musya'* untuk dijadikan masjid atau pemakaman itu tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batasan-batasannya. Ada dua hal yang merintangi menjadikannya masjid atau pemakaman, yaitu:

---

<sup>54</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T, Th), h. 16631.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.341-342.

- a) Jika bagian darimusya' tersebut diwakafkan untuk dijadikan pemakaman, maka pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya. Tahun pertama menjadi pemakaman umum, dan tahun berikutnya menjadi tanah pertanian atau tempat pengembalaan hewan. Ini mengakibatkan hal yang buruk.
- b) Kebersamaan kepemilikan menghambat pemanfaatannya sebagai sedekah karna Allah.<sup>56</sup>
- c. *Al-Mauquf'alaihi*, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf.
- Kalau berwakaf kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu. Maka tidak sah berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya, begitu juga kepada hamba sahaya.<sup>57</sup>
- Wakaf kepada umum. Berwakaf kepada umum di jalan kebaikan adalah sah, bahkan inilah yang lebih penting, misalnya kepada fakir dan miskin, kepada ulama, murid-murid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, untuk membuat jalan, jembatan, benteng, dan kemaslahatan umum lainnya.<sup>58</sup>
- d. *Sighah* yaitu lafadz atau ikrar wakaf
- Tata cara ikrar wakaf ialah wakif mengikrarkan wakafnya kepada nazirdihadapan PPAIW dengan disaksikan sekurang-

---

<sup>56</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf...*, h. 29

<sup>57</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, h. 18

<sup>58</sup> Suliman Rasjid, *Loc.cit.*

kurangnya oleh dua orang saksi. Dengan demikian ada empat unsur dalam ikrar ini, yaitu : wakif, nadzir, PPAIW, dan saksi-saksi.<sup>59</sup>

Ucapan ikrar wakaf seperti: “Saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin,” atau “Saya wakafkan ini untuk membuat benteng,” dan sebagainya. Kalau mewakafkan kepada sesuatu yang tertentu hendaklah ada kabu (jawab), tetapi wakaf untuk umum tidak disyaratkan kabul.<sup>60</sup>

## 2. Syarat wakaf

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah sebagai berikut:

### a. Syarat Waqif

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut<sup>61</sup>:

#### 1) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat

---

<sup>59</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara, 1997, h. 40.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, h. 314



mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.<sup>62</sup>

## 2) Baligh

Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup umur. Dalam Hukum perdata yang dimaksud orang dewasa adalah berusia 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan anak-anak yang belum baligh karena dia belum *mumayiz*. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fuqaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah dan Zaidiyah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h.29.

<sup>63</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-Waqf fi al-islam Maqashid wa Qawa'id, An-Nasyir al-Ma'arif*, Iskandariyah, 1999, h. 249.

### 3) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seseorang budak (hamba sahaya) tidak sah karena wakaf adalah penguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.<sup>64</sup>

### 4) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), *mahjur* adalah orang yang di batasi hak-hak keperdataannya. Dalam istilah fiqh pembatasan hak ini dikenal dengan istilah *hajr*. *Hajr* menurut bahasa berarti *tadyiq wa man'u* (membatasi dan menghalangi).<sup>65</sup>

### 5) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan

---

<sup>64</sup> Al-Bajjuri, *Hasyiyah al-Bajur*, (Bairut : Dar al-Fikr), Juz II, h. 44.

<sup>65</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqih as-Sunnah, Jilid 3*, Li at-Thaba" ahwa al- Nasyir, Beriut 1983, h.

untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>66</sup>

b. Syarat *Mauqufbih* (Harta yang diwakafkan)

Syarat sahnya harta wakaf

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh di dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*).<sup>67</sup>

Menurut Madzhab Hanafi *mal mutaqawwim* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan :

- a) Sesuatu yang buka harta. Seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- b) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islamitu sendiri.<sup>68</sup>

2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

---

<sup>66</sup> Al-Baijuri, *Op. Cit.*

<sup>67</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Raja Wali Press, Jakarta, 2015. h. 25

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 27.

Karena tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.<sup>69</sup>

### 3. Milik wakif

Harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.<sup>70</sup>

### 4. Terpisah bukan milik bersama (*musya'*)

Milik bersama itu adakalanya milik dapat dibagi, juga adakalanya tidak dapat dibagi. Misalkan seseorang mewakafkan harta untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.

#### c. Syarat *Mauquf'Alaihi* (penerima wakaf)

Yang dimaksud dengan tujuan *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta Depag RI, 2006, h. 46.

kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqh mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut pandangan Islamataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- 1) Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
- 2) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.<sup>71</sup>

d. Syarat *Shighat* (ikrar wakaf)

1) Pengertian *shighat*

*Shighat* wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab

---

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 46-47.



saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf'alaihi. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhakny mauquf'alah memperoleh manfaat wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

## 2) Status *Shighat*

Status *shighat* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

## 3) Dasar *Shighat*

Dasar (dalil) perlunya *shighat* (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Adapun lafadz *shighat* wakaf ada dua macam, yaitu :

a) Lafadz yang jelas (*sharih*), seperti :

وَقْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafadz tersebut idak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

b) Lafadz kiasan (*kinayah*)

صَدَقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau lafadz ini di pkai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*tashaddaqtu*” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafadz “*harramt*” bisa berarti dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafadz “*abbadt*” juga berarti semu pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu disertai dengan niat wakaf secara tegas.<sup>72</sup>

## E. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuannya, batasan waktu, dan penggunaannya. Di bawah ini akan di uraikan penjelasan mengenai macam-macam wakaf.

a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya.

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi/umum*), adalah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 54-55.

ajaran Islam dan yang di anjurkan karena wakaf yang benar-benar dapat di nikmati manfaatnya oleh masyarakat.

- 2) Wakaf keluarga (khusus/*dzurri*), yaitu wakaf yang diperuntukkan, kepada keluarga, keturunan, dan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.<sup>73</sup> Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang di kehendaki oleh si wakif.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b. Wakaf berdasarkan batas waktunya:

- 1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk suatu barang yang sifatnya abadi seperti tanah, bangunan gedung beserta tanahnya ataupun barang yang bergerak yang di tentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan serta menggantinya jika ada kerusakan.
- 2) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

---

<sup>73</sup> Khumedi Ja“ far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Permatanet, Bandar Lampung, 2015. h. 118.

c. Berdasarkan Penggunaannya.

- 1) Wakaf langsung, yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, dan lain-lainnya.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>74</sup>

#### **F. Pendapat Madzhab Tentang Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf**

Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai harta wakaf, diantaranya :

1. Menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabillah bahwa orang yang menyewa tidak bisa mewakafkan hasil dari barang yang disewa. sebab menurut mereka wakaf di syaratkan untuk selamanya. Mereka juga menjelaskan bahwa menarik kembali harta wakaf dapat diqiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya.<sup>75</sup>
2. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang memiliki hak manfaat suatu barang (selain budak) seperti orang yang menyewa, orang yang diberi wasiat mendapatkan hasil barang, wakaf mereka tidak sah. Namun jika orang yang menyewa mewakafkan bangunan atau tanaman

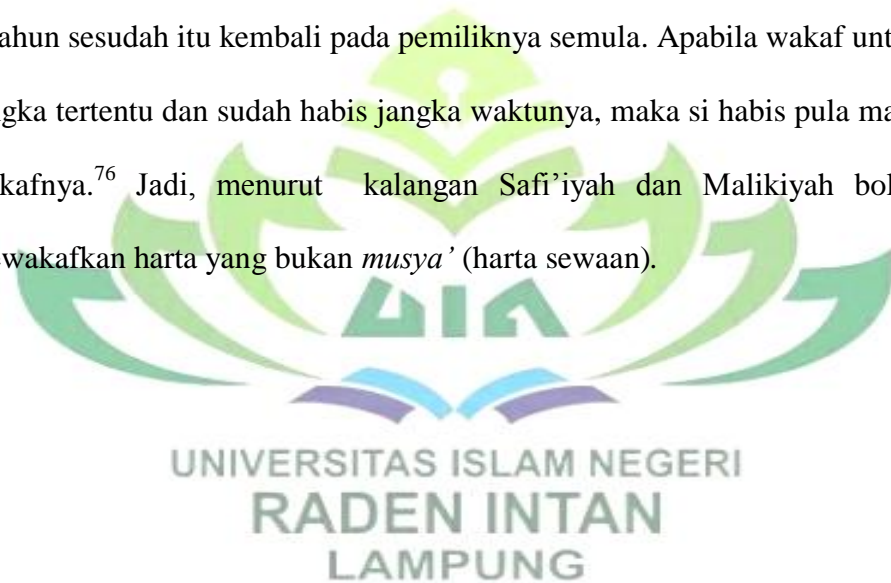
---

<sup>74</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khilafah. Jakarta Timur, 2007, h. 161

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 282.

yang ada ditanah yang disewa, pendapat yang *shahih* adalah boleh sampai keberlangsungan wakaf terjadi sampai pemilik tanah melepasnya setelah masa tempo sewa-menyewa selesai.

3. Kalangan Malikiyah mengatakan wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk jangka waktu tertentu misalnya setahun sesudah itu kembali pada pemiliknya semula. Apabila wakaf untuk jangka tertentu dan sudah habis jangka waktunya, maka si habis pula masa wakafnya.<sup>76</sup> Jadi, menurut kalangan Safi'iyah dan Malikiyah boleh mewakafkan harta yang bukan *musya'* (harta sewaan).



---

<sup>76</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jakarta : Darulfikir jilid 10, 2011, h. 283



### **BAB III**

## **UNDANG- UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HARTA BENDA SEWA SEBAGAI WAKAF**

### **A. Konsep Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

#### **1. Latar Belakang UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Hal-hal yang melatarbelakangi disusunnya RUU tentang wakaf dapat dikelompokkan dalam tiga aspek meliputi aspek historis, aspek teologis atau aspek sosiologis.

##### **a. Aspek Historis**

Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni :<sup>77</sup>

##### **1) Periode Tradisional**

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Benda-benda wakaf kebanyakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, musala, pesantren, tanah perkuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Dalam fase ini aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah *mahdhah*. Umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya

---

<sup>77</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2015) h. 237.

terbatas untuk kepentingan pribadatan, seperti masjid, mushala, sekolah dan lain lain. Peruntukan yang lebih menjamin produktifitas dan kesejahteraan umat tampaknya masih belum diterima..

## 2) Periode Semi Profesional

Periode ini pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal.

## 3) Periode Profesional

Periode ini di tandai dengan pemberdayan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM Nazhir, pola kemitraan usaha dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang saham, surat berharga lainnya. Karena pada fase ini di lahirkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam proses perumusan kebijakan wakaf pada umumnya dibuat berdasarkan ansumsi ansumsi ideologis yang menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik. Dimasa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu di tandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah

madrasah, pondok pesantren, masjid yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.<sup>78</sup>

Pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan karena peraturan perwakafan yang baru belum ada. Adapun peraturan yang mengatur pada masa orde baru adalah :

a) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1994 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengurus wakaf. Selanjutnya PP ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri agama No 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk menyelidiki mendata, dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria Tanggal 5 Maret 1959 No Pem. 19/22/23/7:S.K./62/Ka/59P mengalihkan kewenangan bupati sebagai pengawas harta wakaf menjadi tugas Kepala Agraria. Secara hierarki peraturan hukum di Indonesia ini masih lemah. Kemudian, aturan tentang wakaf dimasukkan dalam undang-undang.<sup>79</sup>

b) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam Pasal 49 undang-undang ini

---

<sup>78</sup> Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, Republika, 14 maret 2008

<sup>79</sup> Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 140.

dinyatakan, negara melindungi keberlangsungan perwakafan di Indonesia dan mengaturnya secara khusus dalam peraturan pemerintah,<sup>80</sup> namun peraturan pemerintah ini baru lahir tahun 1977.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan, seperti terjadi pada Orde Lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administrasi semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa Orde Baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan sipil terutama Islam. Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa Orde Baru :<sup>81</sup>

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Dengan adanya peraturan pemerintahan ini, perwakafan tanah milik Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf kurang memadai sehingga banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan

---

<sup>80</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

<sup>81</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Op.cit., h. 242

ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum kuat.

Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, seluruh peraturan yang mengatur perwakafan seperti yang tercantum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>82</sup>

selanjutnya peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik dan peraturan pelaksana teknis lainnya. Walaupun peraturan pemerintah ini telah dikeluarkan, dalam perjalanannya ternyata peraturan-peraturan perwakafan yang ada belum berjalan secara efektif dalam menertibkan wakaf di Indonesia.

b) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan. Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokrasi di penghujung tahun 1990-an, membawa perubahan sehingga mengokohkan Islam sebagai salah satu

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik



kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang secara khusus mengatur wakaf.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu, Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.<sup>83</sup> Sejak keluarnya Intruksi Presiden dan Surat Keputusan Menteri secara prakti telah menjadi hukum materil terapan di Peradilan Agama yang digunakan oleh para hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagaimana dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>84</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan berniali menurut hukum Islam.

#### b. Aspek teologis

Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran idelogi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap ke-Esaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan

---

<sup>83</sup> Nurjihad, Pembaharua Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal *Hukum*, Vol. 11, No. 27, JAN 2004 : 110.

<sup>84</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h.65

sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial. Perinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, dalam firman QS : at-taubah : 103 berbunyi :



مَنْ سَكَنَ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُوَ (التَّوْبَةُ : ١٠٣)

Artinya : “ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>85</sup> (QS : at-Taubah :103)

Sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggungjawaban moral. Semua yang ada dilangit dan bumi ini

---

<sup>85</sup>Departemen Agama RI Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, h. 203

adalah milik Allah. Pemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah atau titipan belaka.<sup>86</sup>

Menurut al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara ideologis bahwa ada sebagian darinya menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama seperti fakir miskin atau didermakan ke lembaga-lembaga sosial, lembaga kemanusiaan atau lembaga pemberdayaan lainnya.<sup>87</sup>

Dalam peruntukannya, tanah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan kelanjutan hidup manusia. Siapapun dan dimanapun, seseorang akan selalu membutuhkan tanah. Karenanya, tanah termasuk harta benda primer yang melekat dengan kehidupan itu sendiri. Paradigma pemahaan masyarakat Indonesia terhadap tanah menjadi sangat penting ketika dihubungkan dengan perkembangan penduduk seperti sekarang ini. Sudah barang tentu, penyediaan tanah baik sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian atau sebagai areal pembangunan akan menempati kebutuhan pokok dan tentu saja akan menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup peka. Karena harus diakui, bahwa untuk saat ini terlihat semakin meningkatnya kebutuhan

---

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, h.8

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 9

tanah sementara areal tanah semakin sempit. Karena itulah, secara ideologis, pemberdayaan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat manusia.<sup>88</sup>

c. Aspek Sosiologis

Setelah memiliki landasan ideologis yang bersumber pada kalimat tauhid (*la illaha illallah*), wakaf mempunyai kontribusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkret dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam melarang orang menjadi kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Dengan itulah diciptakan lembaga wakaf, disamping lembaga-lembaga lainnya.<sup>89</sup>

**2. Konsep Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Dengan disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan pemahaman masyarakat Indonesia lebih luas tentang wakaf. Karena selama ini wakaf yang kita jumpai di masyarakat pada umumnya lebih banyak bersifat konsumtif dan lebih terfokus untuk kepentingan pembangunan atau sarana untuk ibadah.

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>89</sup>*Ibid.*, h. 13

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara moderen.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Adapun beberapa unsur dalam UU Wakaf no. 41 Tahun 2004, tentang pemahaman dan peraturan baru dalam wakaf untuk dapat mensejahterakan umat. Diantaranya :

a. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Dengan disahkannya UU wakaf ini diupayakan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air kita secara produktif. Wakaf dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan professional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat, Sehingga wakaf tidak hanya berhenti menjadi kekayaan umat Islam, dengan segala problematikanya.

b. Harta Benda Wakaf

Dalam UU wakaf ini mengukur harta benda wakaf bukan hanya harta benda yang tidak bergerak saja, tetapi harta benda yang bergerak



pun diatur di dalamnya, sebagaimana termaktub dalam pasal 15 dan 16 UU RI No. 41 Tahun 2004, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Seperti halnya uang (wakaf cash), saham, surat berharga, surat-surat berharga, hak sewa dan hak kekayaan intelektual. Karena wakaf uang, saham, merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Dan ini adalah terobosan yang signifikan dalam dunia perwakafan khususnya di Indonesia.

c. *Nazhir*

Dalam Fiqh maupun UU wakaf ini, persyaratan nazhir adalah persyaratan umum. Karena nazhir adalah orang atau pihak (badan hukum atau organisasi) yang berhak bertindak terhadap harta wakaf, baik yang memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>90</sup> *Nazhir* dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Supaya *nazhir* wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana dengan apa yang mereka kerjakan atau pertanggung jawabkan.

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Nazhir Professional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005, hlm. 69-70.

d. Badan wakaf Indonesia (BWI)

Salah satu yang baru dalam UU wakaf ini adalah dengan adanya kelembagaan badan wakaf Indonesia (BWI), dimana dalam peraturan wakaf sebelumnya KHI maupun dalam PP No. 28 Tahun 1970 tidak tercantum.<sup>91</sup>

Sebagai lembaga wakaf nasional BWI mempunyai visi: “terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.” Dan mempunyai misi : “menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdaya masyarakat.”<sup>92</sup>

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi BWI adalah :

- 1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- 2) Membuat peratauran dan kebijakan di bidang perwakafan.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan keamanan nashir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- 5) Mengoordinasi dan membina seluruh *nashir* wakaf.
- 6) Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h.90.

<sup>92</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif, Op.cit.*, h. 406.

- 7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 8) Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang bersekala nasional dan internasional.

Untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang penulis teliti, jadi peneliti akan lebih luas pembahasannya dalam harta benda wakaf berupa hak sewa.

#### **B. Harta Benda Sewa sebagai Wakaf**

Kondisi sosial ekonomi yang berubah dan selalu berubah selamanya membutuhkan kepentingan-kepentingan baru yang tidak ada batasanya. Maka bentuk wakaf juga banyak muncul sejalan dengan perubahan dan kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi. Masyarakat sekarang telah menciptakan kepentingan umum yang banyak dari berbagai bentuk kebaikan, salah satunya wakaf.

Masalah perkembangan harta wakaf harus dilihat sebagai masalah baru, baik disebabkan oleh adanya faktor yang muncul yang menyebabkan hal itu, atau karena pentingnya harta wakaf dan jumlahnya yang besar di tengah relita sosial dan ekonomi.

Dan setelah di sahkanya UU RI No 41 Tahun 2004, pada tanggal 27 Oktober 2004, banyak perkembangan yang terjadi dalam dunia perwakafan di Indonesia, terutama dalam harta benda wakaf. Di tegaskan dalam UU wakaf ini, bahwasanya harta yang bisa di wakafkan ialah harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak.

- 1) Benda tidak bergerak, yaitu Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, seperti : Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>93</sup>
- 2) Benda Bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis di konsumsi, meliputi :
- a) Uang : yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.
  - b) Logam mulia; seperti emas dan perak batangan, perhiasan emas, perak, dinar dan dirham.
  - c) Surat berharga; seperti saham perusahaan syariah (terdaftar di bursa efek), *goodwill* saham perusahaan syariah tertutup, sukuk (obligasi)

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

retail syariah, deposito syariah dan reksadana syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi dan wasiat wakaf dalam surat wasiat. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan *dividen* (bagi hasil). *Dividen* (bagi hasil) yang diperoleh inilah yang akan didayagunakan untuk keperluan wakaf.

- d) Kendaraan; untuk wakaf kendaraan, maka yang diwakafkan adalah nilai manfaat kendaraan sesuai waktu optimal pemanfaatannya.
- e) Hak atas kekayaan intelektual; arti dari hak atas kekayaan intelektual sendiri adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*), bidang industri, Ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya.<sup>94</sup> Adapun penjabaran lebih rinci mengenai jenis-jenis HAKI yang dapat dijadikan obyek wakaf ditegaskan dalam pasal 21 butir b peraturan pelaksanaan UU wakaf PP Nomor 42 Tahun 2006, berupa : hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>95</sup>
- f) Hak sewa; hak sewa menurut pasal 44 ayat (1) UUPA memungkinkan orang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemilik tanah tersebut sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat

---

<sup>94</sup> Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : CV Yraa Widya, cet ke-2, 2006, h. 13.

<sup>95</sup> Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



dilakukan sebelum atau sesudah tanah dipergunakan pembayaran uang sewa juga dapat dilakukan hanya satu kali atau setiap waktu tertentu.<sup>96</sup>

Wakaf hak sewa ialah mewakafkan manfaat barang yang di sewa selama masa menggunakannya masih ada. Contohnya : seseorang menyewa sebuah bangunan selama 10 tahun kemudian bangunan tersebut dijadikan masjid untuk shalat.

- g) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya usaha layanan publik (rumah sakit, sekolah, universitas, sarana olah raga, dll), usaha komersial (minimarket, restoran, waralaba, pabrik, hotel,dll). Di dalam wakaf ini yang dikelola adalah seluruh aset baik aset tetap maupun aset manajemen.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

#### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>96</sup>Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) harta benda tidak habis di konsumsi, meliputi :
- a. Uang;
  - b. Logam mulia;
  - c. Surat berharga
  - d. Kendaraan;
  - e. Hak atas kekayaan intelektual;
  - f. Hak sewa;
  - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>97</sup>

Dan dalam pasal 16 ayat 3 huruf (f ) ialah hak sewa, ini adalah hal baru dimana harta benda sewa dapat di wakafkan. Karena selama ini masyarakat Indonesia hanya terfokus terhadap harta benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan atau lebih menekankan terhadap keabadian harta wakaf tersebut.

Sebelum penulis lebih lanjut membahas tentang harta benda sewa berupa wakaf alangkah baiknya lebih dulu membahas apa yang dimaksud dengan hak sewa.

Dalam Kamus Hukum, tidak ada yang secara tegas mendefinisikan hak sewa, untuk itu penulis akan mendefinisikan perkata. *Hak* adalah kepunyaan milik, kekuasaan yang baru untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>98</sup>

Sedangkan *sewa-menyewa* adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari barang, selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu

---

<sup>97</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>98</sup> Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, h. 154

disanggupi pembayarannya.<sup>99</sup> Sedangkan *sewa* itu sendiri ialah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>100</sup> Dalam hukum Islam *hak* secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian.<sup>101</sup> Menurut sebagian ulama Mutaakhirin *hak* adalah suatu hukum yang telah ditetapkan syara'. Menurut Syekh Ali Al-Khafif (asal Mesir) *hak* adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara.

Sewa dalam Islam disebut sebagai *Ijarah*, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa Indonesianya ialah ganti, upah. Sedangkan menurut istilah *hakad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*

Wakaf hak adalah apabila yang diwakafkan berupa hak bernilai materi atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan.<sup>102</sup> Wakaf hak atau manfaat adalah harta yang akan diwakafkan berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Karena Manfaat barang yang dimiliki penyewa tidak selamanya dimiliki, jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, h. 438-439

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 933

<sup>101</sup> Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 1-3

<sup>102</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjem Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 188

<sup>103</sup>*Ibid.*, h. 196

Contoh ini sama dengan seseorang menyewa bangunan selama 10 tahun, kemudian bangunan tersebut dijadikan masjid untuk shalat.

Adapun contoh lain seperti seseorang menyewa mobil selama 6 bulan, dan selama 6 bulan, mobil itu dijadikan mobil ambulan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.

Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*) merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya : benda wakaf itu diketahui, jelas ukurannya dan tempatnya dan benda wakaf merupakan milik sempurna dari wakif karena wakaf menggugurkan hak milik. Ulama malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain.<sup>104</sup>

Wakaf hak-hak yang bernilai materi berkembang sangat pesat, sebagaimana juga wakaf manfaat yang bernilai materi. Dalam perspektif fiqh, hak yang bernilai materi seperti hak ilmiah dan manfaat yang bernilai materi, merupakan bagian dari harta yang boleh diwakafkan.<sup>105</sup> Menurut Achmad kalau melihat kecenderungan masyarakat, dimana ada sebagian orang hanya memiliki hak hak sementara, seperti HGB, hak pakai, maka wakaf berjangka sangat dimungkinkan.

Pemahaman terhadap wakaf sendiri ialah bagaimana harta yang telah diwakafkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, baik untuk selama-lamanya maupun semetara (jangka waktu tertentu).

---

<sup>104</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo, cet ke -1, 2006), h. 315.

<sup>105</sup> *Loc.Cit.*, h.109

Pembaharuan terhadap paham wakaf, tidak akan menyalahi konsep dasar wakaf. Namun sebagaimana harta benda bergerak terutama hak sewa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf tersebut

Ibnu Arafah dari Mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Mundzir Qahaf dalam manajemen wakaf produktif. Mendefinisikan wakaf yaitu “memberi manfaat sesuatu selama barangnya masih ada.” definisi tersebut menunjukkan adanya perkataan yang memperbolehkan wakaf sesuatu yang waktunya terbatas karena usianya, maka batasan waktu wakafnya adalah selama wakaf itu masih ada.<sup>106</sup>

Jalaluddin al-Mahally membolehkan mewakafkan benda bergerak dengan memanfaatkan hak dari objek tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِّقًا بَوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ  
وَرِيَّةَ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW berkata: “Barangsiapa yang mewakafkan kuda untuk jihad di jalan Allah dan mengharap ridha Allah maka sesungguhnya makananya, kotorannya dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya terdapat beberapa kebaikan.”<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, h. 146

<sup>107</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qulyubi wa Amirah*, Jilid 3, (Mesir, Dar al-Ahya', t,th), h. 98.



Ditinjau dari tujuan wakaf adalah menyalurkan manfaat ke jalan kebaikan. Dengan kata lain, wakaf manfaat yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dari pemilik barang adalah menyerupai wakaf sementara dan bagi para ahli mengakui adanya wakaf sementara. Manfaat barang tidak selamanya dimiliki oleh pemilik barang, seperti halnya dalam barang sewa, pemberian manfaat, atau wasiat atas suatu manfaat dan wakaf seumur hidup bagi yang mengakuinya.

Sebenarnya inti pembentukan wakaf adalah menahan harta sejak waktu dikeluarkannya.<sup>108</sup> Dengan kata lain, wakif telah memberikan pokok harta tetap yang dapat menghasilkan manfaat dan dapat dipergunakan oleh orang-orang yang berhak atas wakaf, walaupun dengan batasan waktu. Untuk itu benda yang dipandang sah untuk diwakafkan ialah benda tersebut harus memiliki nilai guna.

Sebagaimana menurut Abdur Rahim yang dikutip oleh Asaf A.A. Fyze dalam pokok-pokok hukum Islam II, menyatakan bahwa harta yang dipersembahkan atau diwakafkan haruslah mempunyai 2 sifat : *Pertama* harta benda itu haruslah yang *mal*, yaitu benda yang nyata. *Kedua* benda itu haruslah dapat dipakai (diambil manfaatnya) dan tidak habis dalam proses pemakaiannya itu. Asal saja kedua sifat itu terpenuhi tidaklah lagi ada batasan-batasan lainnya.

Dari segi akadnya, wakaf memang diakui sebagai akad sepihak dan termasuk akad *tabarru'*, yang tidak membutuhkan qabul dari nadzir. Tetapi

---

<sup>108</sup> mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, h. 229

terhadap akad tersebut harus disikapi secara hati-hati Nadzir harus dilihat profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas dan terpopuler adalah track record (rekam jejak) sehingga akuntabilitas publiknya dapat dipertanggungjawabkan. Hal terpenting pula terkait dengan akad adalah dimungkinkan timbulnya sengketa yang memerlukan pembuktian untuk keabsahan sehingga dipersyaratkan adanya (1) dokumen dan (2) saksi. Keduanya bukan menjadi rukun tetapi alat bukti yang harus ada dan dapat menguatkan keberadaan adanya akad (penyerahan) wakaf.

Ibnu Qayyim al-Jauzziyah, dikutip oleh Taufik Hamami dalam *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* mengatakan bahwa pelaksanaan hukum dapat saja berubah sesuai dengan perubahan waktu lingkungan dan kebiasaan. Sedangkan dalam Islam hanya memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pegaturanya diserahkan pada *Ulil Amri* (pemerintah/ulama), dan *ahlul halli wal aqdi* (orang yang mampu menganalisa dan menyimpulkan masalah).<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Muhammad Thalhah Hasan, *Dirkurus Islam Kontemporer*, cet ke-3, (Jakarta: PT. Lista Fariska Putra, 2003), h. 14

**BAB IV**  
**ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BENDA SEWA**  
**SEBAGAI WAKAF DALAM PASAL 16 AYAT 3 HURUF (F) DALAM**  
**PRESFEKTIF HUKUM ISLAM**

Islam sebagai *Ad-din* (agama), telah menawarkan berbagai doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, pertama kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, kedua kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu doktrin Islam dalam bidang sosial ekonomi adalah seperangkat alternatif yang dinamakan sebagai “lembaga-lembaga sosial Islam” yang terdiri dari *zakat, infaq, shadaqah*, wakaf dan *hibah*.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cukup religius, dimana agama cukup berpengaruh dalam pembentukan tata kehidupan dan tata tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu, agama dijadikan salah satu acuan bagi program pembangunan nasional. Islam juga merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, sebagai salah satu sistem yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia, dengan diri sendiri, masyarakat, benda dan lingkungan.

Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah, yang nilainya lebih dalam pada ibadah sosial. Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat berpengaruh dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan. Setidaknya ada dua paradigma yang terkandung dalam wakaf yaitu paradigma ideologi dan paradigma sosial ekonomi.

Paradigma ideologi adalah wakaf yang diajarkan oleh Islam yang mempunyai sandaran ideologis yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang berpacu pada keyakinan terhadap Esa-an Tuhan, dimana dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Sedangkan paradigma sosial ekonomi, dimana wakaf menjadi jawaban konkret dalam realitas kehidupan sosial.

Wakaf adalah salah satu bagian dari hukum Islam dan merupakan masalah kemasyarakatan. Dengan sedikitnya dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, untuk itu perlu ada penafsiran/ijtihad para ulama yang harus dilakukan terhadap dasar hukum wakaf. Karena seiring dengan perkembangan zaman masalah wakaf berubah berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, sebagaimana hukum itu terjadi perubahan, baik disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat istiadat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَّاكِنِ

Artinya : “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa”. Berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu

Karakter dinamis hukum Islam diisyaratkan sendiri oleh Al-Qur'an Oleh karenanya, Al-Qur'an tidak mungkin menjadi musuh bagi perubahan dan pemikiran baru. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an berdimensi luas serta tidak menjadi penghujung bagi perkembangan pemikiran manusia.

Selain itu juga menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dikutip oleh Taufik Hamami dalam *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* mengatakan bahwa pelaksanaan hukum dapat saja berubah sesuai dengan perubahan waktu lingkungan dan kebiasaan. Sedangkan dalam Islam hanya memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pegaturanya diserahkan pada *Ulil Amri* (pemerintah/ulama), dan *ahlul halli wal aqdi* (orang yang mampu menganalisa dan menyimpulkan masalah).

Sangat jelas dalam permasalahan wakaf banyak terdapat ruang bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu hukum wakaf berubah ubah. Sebagaimana kaidah ushul fiqih :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ الْأَرْمَانِ وَالْأَمْكَانِ  
UNIVERSITAS RAJAB RAHMAN  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Artinya : “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa”. Berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu.

Pada hakikatnya, perubahan/pengembangan dalam bidang hukum adalah suatu usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan hukum baru yang lebih baik dan mempermudah masyarakat. Dalam memaksimalkan pengaturan wakaf pemerintah membentuk UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.



Secara tidak langsung dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, mengubah pemahaman masyarakat bahwasanya harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya terbatas pada tanah saja, sebagaimana yang tertera dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 dan lebih spesifikasinya lagi harta benda wakaf berupa benda bergerak yang tidak habis dikonsumsinya berupa hak sewa termasuk didalamnya.

Sedangkan para ulama mazhab sepakat bahwasanya di syaratkan untuk barang yang diwakafkan itu harus sesuatu yang konkrit merupakan milik orang yang mewakafkan, dan harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*, dan menurut Imam Hanafi tidak sah mewakafkan, sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat rumah sewaan, untuk ditempati dan harta yang tidak *mutaqawwim* seperti alat-alat musik yang tidak boleh digunakan dan buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang memiliki hak manfaat suatu barang (selain budak) seperti orang yang menyewa, orang yang diberi wasiat mendapatkan hasil barang, wakaf mereka tidak sah. Namun jika orang yang menyewa mewakafkan bangunan atau tanaman yang ada di tanah yang disewa, pendapat yang *shahih* adalah boleh sampai keberlangsungan wakaf terjadi sampai pemilik tanah melepasnya setelah masa tempo sewa-menyewa selesai.

Kalangan Malikiyah mengatakan bahwa orang yang menyewa berhak mewakafkan hasil dari sewaan dalam tempo penyewaan yang ditentukan. Sebab

menurut mereka, keabadian wakaf tidak disyariatkan. Wakaf sah untuk tempo tertentu.

Dengan melihat masyarakat Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti madzhab Syafi'iyah oleh karenanya diperbolehkan wakaf hak sewa tersebut. Dalam hak sewa tidak ada ketentuan dari nash yang menyatakan dengan tegas melarang menyewakan barang sewaan, maka kiranya barang sewaan dapat disewakan kembali.

Ditinjau dalam Kaidah Ushul Fiqh *istihsan*, yang berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” maka wakaf harta benda sewa ini diperbolehkan. Dengan diperbolehkannya wakaf berupa hak sewa diyakini dapat membantu keterpurukan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan diharapkan mampu mempertahankan eksistensi wakaf itu sendiri, hal ini disebabkan sebagian masyarakat Indonesia hanya mempunyai hak, tidak mempunyai milik untuk mereka wakafkan.

Wakaf sebagai akad *tabaru*, yaitu transaksi dengan melepaskan hal, bukan berarti melepaskan benda atas hak pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanyalah hasil dari manfaat dari pada benda pokok (asal) yang diwakafkan itu. Seperti wakaf ternak, bukan hewannya yang diwakafkan melainkan susu atau daging yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Karena benda pokoknya hewan akan menjadi milik orang yang mewakafkan dan ia mempunyai hak penuh atas hartanya untuk mentransaksikan hartanya itu.

Wakaf hak sewa memiliki kaitan dengan wakaf jangka waktu, selama ini, umat Islam Indonesia memahami bahwasanya wakaf itu untuk selama-lamanya (permanent), sebagaimana tercantum dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (1) yang berbunyi " wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian bendamiliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya."

Setelah lahirnya UU wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, sejalan dengan perkembangan zaman akhirnya wakaf jangka waktu tertentu diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : " wakif adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."

Dengan melihat kenyataan yang ada dimasyarakat, jelas wakaf termasuk lingkungan fiqh dan seiring perkembangan zaman wakaf mengalami perkembangan. Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*) merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya : harta tetap zatnya, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, harta yang diwakafkan harus lah jelas wujud dan batasan-batasannya, dan yang paling utama harta yang diwakafkan itu benar-benar kepunyaan wakif dan terbebas dari segala beban. Kemudian dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, mengalami

perkembangan yang signifikan terjadi dalam harta benda wakaf, pemberlakuan hak sewa sebagai salah satu harta benda yang dapat diwakafkan. Apakah hak sewa termasuk dalam kategori harta, karena sesuatu yang boleh diwakafkan harus berupa harta.

Dilihat dari konsep harta menurut hukum Islam, secara etimologi harta adalah sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan secara terminologi harta adalah sesuatu yang disukai manusia dan dapat dihadirkan (dimanfaatkan) pada saat diperlukan.

Sikap Islam terhadap harta ialah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang. Islam mensyariatkan agar manusia menikmati kebaikan dunia, dan Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Tuhan. Harta merupakan sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan sarana untuk memperoleh kebaikan itu adalah baik. Tetapi, harta yang banyak bukan berarti kekayaan kesemuanya yang dimiliki baik. Tetapi mengisyaratkan bagaimana penggunaannya harus baik pula, dan harta memiliki tanggung jawab sosial, baik berupa shadaqah, zakat maupun wakaf.

Menurut pendapat penulis, setuju jika hak sewa termasuk salah satu harta benda yang diwakafkan. karena dengan adanya hak sewa sebagai wakaf mempermudah waqif untuk berwakaf walupun waqif tidak memiliki hak penuh terhadap harta tersebut. Sebagaiman harta yang diwakafkan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan azas pemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang

paling esensi dengan keberadaan benda itu sendiri, walaupun dalam batasan waktu tertentu, karena hal ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia. Dan diharapkan dengan diaturnya benda wakaf bergerakberupa hak sewa diharapkan bisa menjadi pendorong agar eksistensi wakaf bisa terjaga.

Dilihat dari hartanya, Menurut Imam Malik, Syafi'i dan golongan Fuqaha lain memperbolehkan menyewakan barang yang disewa, karena dipersamakan dengan jual beli. Dalam hak sewa tidak ada ketentuan dari nash yang menyatakan dengan tegas melarang menyewakan barang sewaan, maka kiranya barang sewaan dapat disewakan kembali. Contoh seseorang menyewa rumah besar, kemudian kamar-kamarnya itu disewakan kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari persewaaan tersebut.

Dengan melihat pendapat para Fuqaha di atas, bahwasannya kebolehan hak sewa dapat disewakan kembali. Menurut penulis bahwa wakaf hak sewa diperbolehkan, dengan melihat hak sewa saja disewakan lagi diperbolehkan, apalagi untuk hal ibadah (wakaf) yang manfaatnya diberikan kepada masyarakat banyak.

Kebolehan hak sewa menjadi salah satu harta yang dapat diwakafkan, memiliki keterkaitan dengan wakaf jangka waktu, karena hak sewa berakhir sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula hukum sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu, tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa. Berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu. Begitu pula hukum wakaf, dimana dengan seiring berkembang zaman berkembang pula harta benda yang dapat diwakafkan pada masa dahulu hanya benda tidak bergerak saja yang dapat diwakafkan namun sekarang benda bergerak juga dapat diwakafkan, salah satunya hak sewa. kalangan Malikiyah dan Safi'iyah juga mengatakan bahwa orang yang menyewa berhak mewakafkan hasil dari sewaan dalam tempo penyewaan yang ditentukan. Sebab menurut mereka keabadian wakaf tidak disyariatkan. Ditinjau dalam Kaidah Ushul Fiqh *istihsan*, yang berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” maka wakaf harta benda sewa ini diperbolehkan. Karena dengan diwakafkannya harta benda sewa ini diyakini dapat membantu keterpurukan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan diharapkan mampu mempertahankan eksistensi wakaf itu sendiri, hal ini disebabkan sebagian masyarakat Indonesia hanya mempunyai hak, tidak mempunyai milik untuk mereka wakafkan. Jadi peneliti menyimpulkan dimana harta benda sewa bisa/boleh diwakafkan. Namun, keberlangsungan wakaf tersebut hanya



berlangsung sampai masa tempo menyewa selesai. Dan selain itu pula tidak ada larangan harta hak sewa untuk ditransaksikan lagi, bahkan untuk disewakan kembalipun diperbolehkan apalagi dengan tujuan untuk beribadah (wakaf).

## **B. Saran**

Setelah penyusun mengkaji permasalahan wakaf dan lebih spesifikasinya harta benda wakaf berupa hak sewa, membuka wawasan baru dalam memahami lembaga wakaf sebagai suatu ibadah, maka dengan ini penyusun menyampaikan beberapa saran :

1. Pemahaman tentang wakaf selama ini beredar di masyarakat perlu di kaji ulang, karena dengan melihat dalil yang menunjukkan tentang wakaf relatif sedikit, untuk itu perlu adanya pemahaman tentang wakaf itu sendiri, baik meyangkut harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi Dari wakaf itu sendiri dengan melihat kondisi sosial saat ini.
2. Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya teknologi dan keadaan masyarakat. Pemahaman tentang wakaf bisa berkembang lagi, baik dari harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi maupun unsur-unsur lain yang terkait dengan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta :Universitas Indonesia,2006)
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1989)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shohih Muslim*, (Jakarta :Pustaka As-Sunnah, 2009).
- Attoillah, M, *Hukum Wakaf*, (Bandung :Yrama Widya,2014 )
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Jakarta :Darulfikir jilid 10, 2011)
- Bakker, Anton A. Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta :Kanisius, 1992)
- Departemen Agama RI Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, (Jawa Barat : CV Penerbit Diponegoro,2008)
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf*, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Jakarta, 2008 )
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2007)
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2007)
- Departemen Agama RI, *Nazhir Professional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005)
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1997).
- Halim, Abdul , *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press,2005)
- Hasan, Tholhah, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Republika, 2008)
- Hasan, Muhammad Thalhah, *Dirkursus Islam Kontemporer*, cet ke-3, (Jakarta: PT. Lista Fariska Putra,2003), h. 14

Ali hasan, *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqihMuamalat)*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2003).

Hasanah,Uswatun, *PeranWakafdalamMewujudkanKesejahteraanSosial*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah,1997)

Imam , Muhammad Kamaluddin. *Al-Washiyahwal-Waqf fi al-islamMaqashidwaQawa" id*, An-Nasyir al-Ma" arif, Iskandariyah ,1999ssss

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Permatanet,2015)

Kaclan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta :Paradigma, 2005).

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*,( Jakarta : PT Raja Grafindo, cet ke-2,1997).

Lubis, K Suhrawadi, *WakafdanPemberdayaanUmat*, Sinar,(Jakarta : Sinar Grafika,2010)

Mughniyah, Muhammmad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj Masykur A.B. Afifi Muhammad idrus al-kaff (Jakarta : PT Lentera Basri Tama, 2000)

Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T, Th), h. 16631

M. S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta 2015,

Praja,Juhaya,*Perwakafan di Indonesia* , (Bandung : YayasanPiara, 1997)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 42 Tahun 2ss004 tentang Wakaf.

PeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 1977 TentangPerwakafan Tanah Milik

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : KHALIFA,cet ke-3,2007)

Rasjid,Suliman,*Fiqih Islam*,( Bandung : SinarBaruAlgensido, 2007)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016)

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2015)

Sembiring, Sentosa, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : CV Yrama Widya, cet ke-2, 2006)

Soekanto, Soejono et. Al., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985)

Sudarsono, *kamushukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-9, 2014)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusan Penelitian dan Penerbitan LP2M Raden Intan Lampung, 2015)

Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999)

W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2013).

## **JURNAL:**

Hazmi, Baslul, *Perandan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum* Vol XVI, No 1, Juni 2016 : 178.

Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, JAN 2004 : 110.

## **Sumber Internet :**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_Kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kualitatif). Diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 14.53 WIB.

[m.hukumonline.com/klinik/detail/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah). Diakses tanggal 10 Mei 2018 Pukul 19.00 WIB

